

CONTINUING EDUCATION: SEBUAH UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME PUSTAKAWAN

Anis Masruri

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang *continuing education* bagi pustakawan. *Continuing education* sangat penting diikuti pustakawan agar mempunyai kompetensi yang baik dan profesional di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat penggunanya. Bukan hanya pengetahuan pustakawan saja yang perlu ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga sikap, dan ketrampilannya, agar mereka tetap dapat *survive* dalam dunia yang serba baru dan penuh tantangan. Media sumber informasi dan perkembangan ICT (*Information and Communication Technology*) telah menuntut perubahan layanan perpustakaan. Hal ini berimplikasi pula pada pustakawannya. Jika *continuing education* tidak dilaksanakan, boleh jadi tugas kepustakawanan akan diambil alih oleh profesi lain. *Continuing education* bagi pustakawan akan berhasil baik dan tepat dalam menentukan materi maupun metodenya jika dimulai dengan analisis kebutuhan. *Continuing education* dapat dilakukan melalui kegiatan formal, non formal, dan informal berupa pendidikan lanjut, workshop, pelatihan, seminar, tutorial maupun secara *independent study*. Untuk itu perlu ditumbuhkan motivasi yang kuat pada diri pustakawan baik motivasi yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya.

Kata kunci : *continuing education*, profesi, profesionalisme pustakawan

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terdengar kerancuan istilah antara pekerjaan (*occupation*) dengan istilah profesi (*profession*). Masyarakat seringkali menggunakan istilah pekerjaan untuk profesi dan sebaliknya. Sesungguhnya kedua istilah tersebut berlainan. Istilah pekerjaan merupakan setiap kegiatan yang menghasilkan ataupun tidak menghasilkan imbalan. Pekerjaan yang tidak menghasilkan imbalan merupakan pekerjaan sukarela, orangnya disebut sukarelawan atau relawan. Dalam perbincangan mengenai pekerjaan, yang sering

dikonotasikan sebagai profesi di antaranya adalah pilot, supir bus, tukang sapu, pedagang, tukang sayur, tukang copet, dan sebagainya. Sedangkan bidang kerja yang sebenarnya amat tepat untuk menggambarkan suatu profesi di antaranya adalah dokter, guru, peneliti, ilmuwan, pustakawan dan pengacara. Profesi merupakan pekerjaan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu serta pengertian khusus. Profesi selalu berkaitan dengan profesional artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatannya merupakan bagian dari profesi¹

Istilah profesi mulai berkembang sekitar abad 18 bersamaan dengan munculnya Revolusi Industri. Revolusi Industri yang terjadi di Inggris ini membutuhkan tenaga manusia yang memerlukan keahlian khusus yang kemudian disebut profesi. Orang yang melakukan profesinya disebut profesional, artinya melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Pustakawan sebagai suatu profesi, mestinya sudah ada sejak perpustakaan lahir. Di Indonesia pengakuan terhadap profesi pustakawan dapat dilihat sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 18 Tahun 1988. Meskipun demikian, sebenarnya profesi pustakawan di Indonesia sudah ada beberapa tahun silam. Awal pengakuan pemerintah terhadap profesi pustakawan dapat dianggap sejak diselenggarakannya Kursus Ahli Perpustakaan (pendidikan yang siswanya berijazah SMA pada waktu itu) sekitar tahun 1953. Pendidikan inilah yang merupakan cikal bakal Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia sekarang. Dengan diadakannya pendidikan ini, secara langsung pekerjaan pustakawan sudah diakui sebagai profesi, bahkan sebagai ilmu.

Keberadaan profesi pustakawan ini diperkuat dengan lahirnya organisasi profesi kepustakawanan sekitar tahun 1954 dengan lahirnya Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI). Dengan terbitnya Surat Keputusan MENPAN Nomor 18 Tahun 1988 orang-orang yang menyangang kedudukan dan melaksanakan profesi pustakawan dihargai dengan diberi angka kredit untuk kenaikan pangkat dan tunjangan jabatan. Dengan surat

¹ Sulistyio Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan* (Jakarta : Gramedia, 1993), hlm. 147.

keputusan ini pula sudah ditulis secara jelas kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalam profesi dan yang menjadi kompetensi para pustakawan. Surat keputusan ini kemudian mengalami revisi dan hasilnya dimuat dalam Surat Keputusan MENPAN Nomor 33 tahun 1998.

Pada Surat keputusan ini profesi pustakawan dapat dijajagi mulai dari pengertian pustakawan itu sendiri, yaitu "pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah atau unit tertentu lainnya"

Dalam Surat keputusan MENPAN tersebut, tugas atau pekerjaan yang tercakup dalam profesi pustakawan, meliputi bidang pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, pemasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi, pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan pengembangan profesi. Seluruh tugas-tugas pustakawan tersebut diarahkan sesuai fungsi perpustakaan dan pusat informasi, yaitu sebagai pusat penyimpanan informasi, pusat penelitian, pusat informasi, pusat pendidikan, dan pusat budaya.

Yang menjadi masalah sekarang apakah pustakawan telah melakukan tugas-tugas kepustakawannya secara profesional ataukah belum? Hal ini mengingat bahwa tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Sumber informasi juga secara revolusioner terus berubah. Informasi yang dulu hanya dikemas dalam bentuk cetak, kini telah berubah ke dalam bentuk digital. Perpustakaan juga tidak dapat dipisahkan lagi dengan dunia teknologi informasi, sebagai salah satu media pelayanannya.

Indonesia sekarang tengah berada pada dunia maya (*cyberworld*, *cyberspace*). Milenium III pada abad 21 ini menunjukkan sebuah fenomena kian meluasnya globalisasi yang melibatkan semua aspek kehidupan umat manusia. Tidak ada lagi negara atau bangsa yang sanggup menghindarkan diri dari globalisasi. Dunia sudah menjadi sebuah dusun global (*global village*). Kini dunia ini bersama segala isinya sudah menjadi fenomena kesejagatan (*globality*).

Kesejagatan berarti proses globalisasi sudah mencapai puncaknya. Boleh dikatakan tidak ada lagi bidang kehidupan yang luput dari pengaruh globalisasi baik langsung maupun tidak langsung.² Kejahatan-kejatahan yang terjadi di belahan dunia Barat dan Timur, pada saat itu juga dapat diketahui di wilayah Indonesia tanpa sensor melalui berbagai media. Media baru sifatnya semakin canggih, volume pesannya semakin besar dan kecepatannya kian tinggi. Hal ini menyebabkan sifat aktualisasi dan kedekatan pesan-pesannya dengan pihak penerima di seluruh dunia (*proximity*) juga kian tinggi. Pengertian tersebut menyatukan antara kedekatan geografis, kedekatan sosiologis, kedekatan kultural, dan kedekatan psikologis di satu pihak dan khalayak (*audience*) di lain pihak.

Buku, jurnal dan penerbitan lainnya yang dahulu bercirikan periodisitas (keteraturan waktu terbit), kini tidak berlaku lagi ketika manusia memasuki wilayah *media online*, *web site* atau situs dalam *cyberspace*. Jika penerbitan konvensional dilengkapi dengan kota dan nama penerbit serta tahun terbit, kini seringkali muncul dalam media online, tulisan-tulisan dan gambar yang dibuat oleh anonim, sehingga isi (*content*)nya seringkali hanya berdasarkan keinginan penulis. Hal ini lambat laun dapat mengikis karakter dan mental atau budaya bangsa. Apalagi untuk kalangan remaja yang rasa ingin tahunya sangat tinggi.

Tentu saja kondisi ini memaksa para pustakawan untuk meningkatkan kualitas keilmuannya agar mempunyai profesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan serta dalam menyediakan informasi. Kalau dahulu pustakawan berasal dari berbagai disiplin keilmuan, yang ditambah dengan kursus perpustakaan, kini kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali. Definisi pustakawan sudah seharusnya diubah, menjadi orang yang berlatar belakang pendidikan khusus ilmu perpustakaan, bahkan harus ditambah dengan kemampuan teknologi informasi canggih.

Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di bidang ilmu perpustakaan dan informasi sebagai pencetak calon-calon pustakawan yang profesional harus mengkaji kembali model dan desain

² A. Muis, *Indonesia di Era Dunia Maya : Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*. (Bandung Remaja Rosdakarya. 2001), hlm.3.

kurikulum yang selama ini diberikan atau diajarkan kepada para mahasiswanya dan kemudian berusaha keras mengikuti trend perubahan zaman yang terjadi sekarang ini. Lembaga pendidikan sudah seharusnya mempunyai desain kurikulum yang dapat memenuhi tuntutan pengembangan profesi pustakawan tersebut, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik.

Di samping lembaga pendidikan secara terus menerus perlu melakukan pengkajian ulang, pustakawan sendiri hendaknya juga mempunyai keinginan dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti *continuing education* agar bekal, ketrampilan, sikap dan wawasannya terus meningkat.

Jika dicermati, masih cukup banyak pustakawan di Indonesia tidak berasal dari pendidikan ilmu perpustakaan. Mereka hanya mengikuti pelatihan-pelatihan kepustakawanan saja. Meskipun ada juga pustakawan yang menyelesaikan pendidikan formalnya di bidang ilmu perpustakaan, akan tetapi sebelum teknologi informasi secara penuh dimasukkan dalam kurikulum pendidikan perpustakaan di Indonesia.

Mereka tidak mempunyai peluang atau kesempatan yang cukup untuk mempelajari teknologi informasi dalam lingkungan pendidikan formalnya. Oleh karena itu *continuing education* diharapkan dapat memainkan peran yang penting dalam membantu pustakawan untuk memperbaharui pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna dengan sebaik-baiknya.

B. PENELITIAN TENTANG *CONTINUING EDUCATION*

Telaah tentang *continuing education* untuk peningkatan kompetensi pustakawan telah dilakukan oleh beberapa penulis. Di antaranya adalah Joe Frank Dahlstrom, menulis disertasi dengan judul *Motivation for Participation in Continuing Library Education* (1982). Disertasi setebal 138 yang diajukan untuk meraih gelar doktor di *University of Texas* ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mendorong pustakawan dalam mengikuti *continuing education*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana data diambil dari kuesioner dan menggunakan Teknik Delphi. Sedangkan faktor-faktor pendorong

diambil dari hirarkhi kebutuhannya Maslow, orientasi tujuannya Houle, dan motivasi model Herzberg. Data-data dianalisis dengan regresi multivariat, dan menghasilkan 7 item yang menjadi pendorong dalam mengikuti *continuing education*, yaitu tantangan intelektual dan adanya stimulasi, ingin mendapatkan kompetensi yang terbaik, peningkatan layanan profesional, pemberian layanan yang lebih baik terhadap pengguna, peningkatan ketrampilan dan spesialisasi, komitmen pada profesi untuk melaksanakan *continuing education*, dan komitmen pribadi dalam mengikuti *continuing education*.³

Arjun Dasgupta dan Jatindra Nath Satpathi menulis *Continuing Education Programmes of Library & Information Science (LIS) Professionals in The Universities of West Bengal (India) With Special Reference to The University of Calcutta* (2006). Kajian ini dimulai dengan kebutuhan *Continuing Education* untuk profesi pustakawan dalam era modernisasi dan teknologi informasi. Kemudian menarasikan aktivitas *Continuing Education* dan pengembangan profesi di beberapa negara berkembang. Penulis juga memunculkan peranan organisasi-organisasi profesi di India dalam kegiatan *continuing education*. Penulis menggarisbawahi beberapa universitas dan institut di India yang menjadi pusat dalam kegiatan *continuing education* dan melakukan analisis kritis terhadap aktivitas tersebut terutama di delapan universitas di Bengal Barat yang didasarkan pada kerja survey.⁴

Mei Wa Esther Woo menulis *Comparative Study of Staff Development in Academic Libraries of Mainland China and Hongkong* (2006). Tujuan dari penelitian dan penulisan tersebut adalah untuk mendapatkan perbandingan antara pelatihan dan pengembangan staf di perpustakaan-perpustakaan akademik di Mayland China dan Hongkong. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa perubahan sosial ekonomi, budaya dan teknologi informasi telah menekan dan mengharuskan

³ Joe Frank Dahlstrom. (1982). Motivation for Participation in Continuing Library Education. *A Dissertation* submitted to the Graduate College of Texas A&M University in Partial Fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy [versi elektronik].

⁴ Arjun Dasgupta and Jatindra Nath Satpathi (2006) *Continuing Education Programmes of LIS Professionals in The University of Bengal (India)*, [Versi Elektronik], Proceeding of The Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice, Singapore : School of Communication and Information, Nanyang Technology University., hlm.230-246.

pengembangan sistem perpustakaan akademi di dua wilayah secara bersama-sama.⁵

Roxanne Missingham menulis *Library and Information Skills for Twenty-First Century Professionals* (2006). Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan oleh profesi pustakawan pada abad 21 dan menyarankan adanya ketrampilan-ketrampilan baru yang diperlukan. Missingham menguti pendapat Whitmell yang mengatakan:

*what is needed are strategic thinkers, people who see and understand the big picture and the environment within which their library operates. These people also needed the ability to be adaptable, flexible, to take risks, to embrace innovation and to be realistic about what can be done.*⁶

Chennupati K. Ramaiah and A. Lakshman Moorthy meneliti tentang *The Impact of Continuing Education Programmes on Library and Information Science Professionals* (2002). Dalam abstraknya dikatakan bahwa perubahan-perubahan di perpustakaan dan ekspektasi pengguna dihubungkan dengan aspek pelatihan ilmu perpustakaan dan informasi. Perubahan-perubahan seperti penggunaan teknologi informasi, komputer, komunikasi, internet, dan multimedia, untuk meningkatkan harapan pengguna tentang kualitas layanan perpustakaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan dan dampak *continuing education* bagi pustakawan diteliti dengan cermat di India, terutama pada pustakawan akademik.⁷

Esharenana E. Adomi and Kenneth I.N. Nwalo menulis *Prospects for Continuing Professional Education for Library and Information Science Professionals in Nigeria : The Case of Delta State* (2003). Penelitian ini dilakukan dengan survey terhadap prospek *continuing professional education* untuk profesi pustakawan di Nigeria dengan menggunakan Delta State sebagai studi kasusnya. Teknik kuesioner dan wawancara secara bersama-sama digunakan untuk

⁵ Woo, Mei Wa Esther. Comparative Study of Staff development in Academic Libraries of Mailand China and Hongkong, [Versi Elektronik], *Proceeding of The Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice, Singapore: School of Communication and Information, Nanyang Technology University*, hlm. 230-238.

⁶ Roxanne Missingham. Library and Information Skills for Twenty-First Century Professionals [versi Elektronik], *Library Management*, vol. 27 no 4/5 , hlm. 266.

⁷ Chennupati K. Ramaiah and A. Lakshman Moorthy. The Impact of Continuing Education Programmes on Library and Information Science Professionals, [Versi Elektronik]. *Library Review*; 51, ½, hlm. 24-31.

memperoleh data. Sejumlah 51 praktisi pustakawan baik pustakawan akademik, publik, perpustakaan khusus dan pusat informasi digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan masih perlu untuk mengikuti *continuing education* dalam rangka meningkatkan kinerja dan juga memperluas pengetahuan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Aleksandra Horvat menulis *Continuing Education of Librarians in Croatia: Problems and Prospects* (2004). Hampir sama dengan penulis-penulis terdahulu, Horvat menyatakan bahwa pustakawan, terutama di Kroasia masih diharuskan untuk mengikuti *training*. Yang jadi masalah adalah siapa pelaksana dari kegiatan *continuing education* tersebut, apakah perpustakaan nasional, perpustakaan perguruan tinggi atau program studi ilmu informasi dan perpustakaan. Kemudian diambil jalan tengah bahwa *continuing education* dilaksanakan di *training centre* dengan melibatkan komponen-komponen yang ada di Kroasia, agar kegiatan tersebut bersifat legal dan diakui oleh semua pihak⁸.

Jika dilakukan kajian lebih lanjut, masih banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan *continuing education* bagi pustakawan. Hanya saja penelitian-penelitian tersebut berada di negara lain. Sejauh pengamatan penulis serta berdasarkan data-data bibliografi, di Indonesia belum pernah dilaksanakan penelitian tentang *continuing education* bagi pustakawan, padahal pustakawan sebagai sebuah profesi telah eksis cukup lama di Indonesia. Tentu saja, tanpa ada penelitian semacam ini, kebutuhan-kebutuhan untuk peningkatan profesi pustakawan menjadi terabaikan. Memang telah ada usaha-usaha untuk meningkatkan kompetensi pustakawan, tetapi semua berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.

Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan yang terpisah-pisah menyebabkan antara lain model-model pelaksanaannya berbeda, tempat dan waktu pelaksanaan yang berlainan, tujuan

⁸Aleksandra Horvat (2004) *Continuing Education of Librarians in Croatia: Problems and Prospect*. [Versi Elektronik], *New Library World*.105,9/10, 370-375.

dan juga desain isi atau kurikulum yang beragam, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa jauh peningkatan kemampuan pustakawan telah dicapai.

C. PENGERTIAN *CONTINUING EDUCATION*

Profesi pustakawan merupakan profesi yang berorientasi pada pelayanan dan mengharuskan secara kontinyu memperbaharui pengetahuan dan ketrampilannya agar dapat meningkatkan efektivitas kerjanya. Tugas utama perpustakaan dan pusat informasi adalah mempertemukan kebutuhan informasi para penggunanya, dan untuk tujuan itu sangat tergantung pada kompetensi stafnya.⁹

Pengetahuan dan ketrampilan yang diharuskan dimiliki oleh pustakawan tidak mungkin didapatkan dalam sekali waktu dan dalam semua hal, melainkan mereka harus memperbaharunya secara terus menerus. Terutama dalam hal pemanfaatan teknologi informasi baik untuk sebagai media penyimpanan (*storage*), penelusuran (*retrieval*) maupun penyebaran (*dissemination*) informasi yang selalu mengalami modifikasi-modifikasi dan perbaharuan-perbaharuan ke arah yang semakin canggih.

Pustakawan juga diharuskan untuk menyesuaikan layanan yang disediakannya dengan pengembangan ekonomi, politik, teknologi, pendidikan dan sosial budaya. Profesi pustakawan hendaknya selalu dapat merespon perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam bidang manajemen pelayanan, perubahan tingkat anggaran, penggunaan teknologi informasi baru, harapan dan kepuasan pengguna serta eksplorasi peluang-peluang baru yang dapat meningkatkan pelayanannya. Perubahan-perubahan ini menuntut seorang pustakawan untuk selalu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan baru, serta menjaga kompetensi dasar yang telah dimilikinya.

Tentu, untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan peluang bagi pustakawan untuk meningkatkan kemampuan dirinya, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat

⁹ Adomi, Esharenana E. and Nwalo Kenneth I.N. (2003) Prospect for Continuing Professional Education for Library and Information Science Professionals in Nigeria : The Case of Delta State. [Versi elektronik]. *New Library World*. 104,11/12, hlm. 499.

digunakan sebagai media untuk meningkatkan kompetensi profesi pustakawan adalah melalui *continuing education*.

Menurut Ramaiah dan Moorthy, *continuing education* didefinisikan sebagai penyediaan peluang dan kesempatan bagi seseorang untuk melanjutkan pembelajaran atau pendidikannya. *Continuing education* tergantung pada keterampilan literasi seseorang, dan juga penyediaan sumber-sumber serta peluang belajar lanjut. *Continuing education* dapat menggunakan prosedur pendidikan non formal, tetapi tidak sama persis. Sistem non formal adalah suatu alternatif yang disediakan untuk membantu orang dewasa/masyarakat yang sangat kekurangan pendidikan (*educationally-deprived adult*) dalam rangka mencapai standar yang sama dengan sektor formal. *Continuing education* merupakan penyediaan pendidikan seumur hidup untuk mempertinggi nilai standar kehidupan dan melengkapi pengetahuan seseorang agar sesuai dengan tantangan mata pencaharian/pekerjaan yang ditekuninya.¹⁰

Istilah yang sering digunakan untuk menyatakan pelatihan non formal adalah pendidikan orang dewasa (*adult education*), pendidikan berkelanjutan (*continuing education*), pendidikan lanjut (*further education*), pendidikan seumur hidup (*lifelong education*), pendidikan kejuruan (*vocational education*), pelatihan perusahaan (*industrial training*), dan pendidikan buruh (*labour education*). Meskipun demikian, istilah yang paling populer di antara istilah-istilah di atas adalah *continuing education* dan *lifelong learning*¹¹.

Sedangkan Knowles dan Clevins mendefinisikan *continuing education* ke dalam tiga kelompok, yaitu 1) definisi ditinjau dari klasifikasi, 2) definisi dilihat dari analisis struktur, dan 3) definisi dilihat dari analisis operasi.¹²

Definisi ditinjau dari klasifikasi harus dimulai dari perbedaan antara pendidikan dan non pendidikan, dan orang dewasa dengan orang yang bukan dewasa. Keputusan apakah termasuk dalam pendidikan atau bukan tergantung

¹⁰ Chennupati K. Ramaiah and A. Lakshman Moorthy The Impact of Continuing Education Programmes...hlm. 24.

¹¹ *Ibid.* halaman. 25.

¹² Chester Klevins (editor). *Materials and Method in Continuing Education*. (Los Angeles : Klevens Publications, tt)hlm. 15-17.

pada kebutuhan-kebutuhan individu seorang pelajar. Meskipun demikian, definisi "adult" dalam konteks pendidikan orang dewasa adalah lebih dari standar, yaitu seseorang yang terputus atau belum selesai dalam pendidikan formal, dan sekarang mencoba untuk melibatkan kembali dalam proses pendidikan.

Definisi ditinjau dari analisis struktur dibagi ke dalam lima bagian, yaitu *leadership, goals, processes, agencies, dan clientle*.¹³ *Leadership* berangkat dari tiga sumber utama, yaitu program pascasarjana, organisasi pemerintah, dan asosiasi profesi. *Goals* dibagi ke dalam empat klasifikasi utama yaitu 1) kompetensi pekerjaan, kompetensi kejuruan dan kompetensi profesional, 2) kompetensi kehidupan individu dan keluarga, 3) tanggung jawab sosial dan warganegara, 4) pemenuhan diri. *Processes* dibagi menjadi tiga topik yaitu metode, teknik dan media. Metode adalah cara yang ditata atau diorganisir oleh seseorang untuk menciptakan aktivitas pendidikan. Teknik adalah hubungan antara hubungan antara pembelajar/siswa dengan tugas belajar. Sedangkan media adalah sumber-sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran agar metode dan teknik dapat dijalankan dengan baik.

Ditinjau dari analisis operasi lebih berhubungan dengan metode yang digunakan dalam proses pendidikan. Di samping itu juga membicarakan hubungan antara agen-sgen penyelenggara pendidikan.

Continuing education untuk profesi pustakawan mempunyai beberapa karakteristik dalam hubungannya dengan profesi lainnya. Knox mengidentifikasi 6 karakteristik dari *continuing education*, yaitu 1) berpusat pada tingkat pengetahuan tinggi dan kompetensi yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan posisi seseorang di tempat kerjanya, 2) kompleksitas pengetahuan profesi, 3) tingkatan verbal yang dapat memfasilitasi seseorang dengan pendidikan kampus, 4) permintaan oleh peserta dalam program pendidikan profesi berkelanjutan untuk memperoleh keunggulan dalam hal isi, personil, dan metode yang disatukan dalam program tersebut, 5) persaingan yang menyita waktu

¹³ *Ibid.* hlm. 16.

seseorang di tempat kerja, dan 6) kemampuan peserta dan asosiasi, lembaga dan institusi untuk membayar biaya program pendidikan yang tinggi.¹⁴

Dalam dekade terakhir, asosiasi profesi perpustakaan baik pada tingkat nasional, regional dan pemerintah telah mulai melakukan aktivitas yang menarik ini dalam *continuing education* bagi profesinya. Steig menyatakan bahwa *continuing education* pada dekade pertengahan dan terakhir ini telah menjadi topik hangat, jangan dikatakan sebagai masalah kecil. Setiap orang ingin bergabung dengan kelompok yang terbanyak, baik di organisasi, asosiasi, perpustakaan, sekolah-sekolah perpustakaan, administrator, dan pustakawan praktisi.

Martin menyatakan bahwa tidak ada bagian dari masyarakat perpustakaan yang semata-mata paling bertanggung jawab pada kegiatan *continuing education*.¹⁵ Tanggung jawab itu harus dipikul bersama oleh karyawan perpustakaan, perorangan, asosiasi perpustakaan, agen, pemerintah, perpustakaan, dan pendidikan perpustakaan baik program sarjana maupun pascasarjana.

Asosiasi pustakawan atau jika di Indonesia adalah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) harus tampil di depan untuk mempromosikan *continuing education*. Seperti American Library Association pada tahun 1970 membuat pernyataan sebagai berikut :

*continuing education is essential for all library personnel, professional and supportive, whether they remain within a position category or are preparing to move into a higher one. Continuing education opportunities include both formal and informal learning situations, and need not be limited to library subjects or the offering of library schools*¹⁶

Di samping itu, pemerintah juga harus memberikan perhatian pada program *continuing education* ini, agar para pustakawan mempunyai pengetahuan dan skill yang baik. Tanpa adanya dukungan pemerintah, boleh jadi semua

¹⁴ Alan B. Knox. *Continuing education for library practitioners*. [versi elektronik] *Illinois Libraries* 56 (1974), hlm. 432.

¹⁵ Allie Beth Martin, *Continuing library what's happening? Who's responsible?* [versi elektronik] *Illinois Libraries* 56 (1974) hlm. 438.

¹⁶ American Library Association. "Libraries education and manpower : ALA policy proposal" [versi elektronik]. *American Libraries* 1 (April 1970). Hlm. 344.

kegiatan tidak akan berhasil dengan baik. Apalagi organisasi pustakawan di Indonesia dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia belum mempunyai kedudukan yang kuat sebagaimana American Library Association.

D. TUJUAN *CONTINUING EDUCATION*

Segala sesuatu yang dilaksanakan perlu tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan, tentu apa yang dilaksanakan tidak dapat memperoleh hasil yang memuaskan karena tidak adanya arah dan pedoman. Jika seseorang ingin memperoleh kesuksesan dalam hidupnya di masyarakat, maka dia harus merasa nyaman dalam masyarakatnya. Sedangkan Corral dan Brewerton mengatakan "*developing your personal capacity to perform effectively at work and in other areas of your life is vital if you wish to survive and thrive in a rapidly changing and highly competitive environment*"¹⁷ Itu merupakan tujuan akhir dari *continuing education*.

Secara lebih rinci, tujuan *continuing education* adalah : 1) mengembangkan ketrampilan berkomunikasi, 2) mengembangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, 3) meningkatkan hubungan kemanusiaan, 4) memfasilitasi berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, 5) membantu perkembangan seseorang.¹⁸ Adapun tujuan dasarnya adalah membantu peran seseorang lebih efektif dalam masyarakat dan lingkungannya.

Sedangkan menurut Stone *continuing education* mencakup peluang-peluang belajar bagi seseorang dalam profesinya dengan tujuan 1) memelihara orang tersebut agar dapat mengikuti konsep-konsep, pengetahuan, dan ketrampilan baru baik dalam bidang keilmuan maupun yang berhubungan dan relevan dengan keilmuan tersebut, 2) memperbaharui pendidikan dasar mereka, 3) menyegarkan pikiran seseorang agar selalu berada dalam jalur karirnya dengan menyediakan peluang untuk memperluas pekerjaan yang ditekuni dalam profesinya, 4) membantu seseorang untuk menguasai konsep-konsep baru sesuai

¹⁷ Sheila Corral and Antony Brewerton. *The New Professional's handbook : Your guide to information services management*. (London : Library Association Publishing, 1999), hlm. 265.

¹⁸ Chester Klevins (editor). *Materials and Method in Continuing ...* hlm. 15.

dengan tuntutan profesinya agar dapat berperan dalam masyarakat atau komunikasinya.

Tujuan-tujuan di atas perlu dijabarkan lebih detail lagi pada saat penyelenggaraan *continuing education*, baik tujuan yang berarah kognitif, afektif maupun psikomotor/skill. Hal itu karena tugas dan tanggung jawab pustakawan dalam melayani penggunaannya tidak hanya dituntut mempunyai keluasan dan cakrawala pengetahuan saja, tetapi juga sikap yang baik, penuh empati, rasa tanggung jawab, kehandalan, dan daya tanggap sangat diperlukan. Begitu juga keterampilan atau skill sangat diperlukan oleh pustakawan, misalnya keterampilan dalam menelusur informasi baik secara manual maupun dengan menggunakan teknologi informasi.

E. PENINGKATAN PROFESIONALISME PUSTAKAWANAN MELALUI CONTINUING EDUCATION

Untuk menentukan apakah pustakawan merupakan profesi atau bukan maka perlu dipahami terlebih dahulu persyaratan untuk dapat disebut sebagai profesi. Secara umum syarat sebagai profesi adalah adanya pengetahuan dan ketrampilan khusus, pendidikan profesi, magang kerja, kemandirian, kode etik, organisasi profesi, perilaku profesional, standar profesi, budaya profesi dan komunikasi profesi.¹⁹

Profesi memiliki keahlian dan ketrampilan khusus yang tidak dimiliki orang awam maupun profesi lain. Jadi misalnya keahlian seorang dokter tidak dimiliki oleh orang awam ataupun oleh guru. Profesi menuntut adanya pengetahuan dan keahlian, dan kemampuan tertentu untuk melaksanakan tugasnya. Kemampuan ini memiliki derajat keahlian yang berbeda-beda. Misalnya, di Sekolah Menengah Tingkat Pertama diajarkan biologi, di Sekolah Menengah Atas diajarkan biologi dan di Program Studi Biologi juga diajarkan biologi. Kemudian timbul pertanyaan, apakah mereka yang diajarkan biologi itu

¹⁹ Sulisty-Basuki menjelaskan bahwa ciri-ciri profesi adalah adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian; terdapat pola pendidikan profesi yang jelas, adanya kode etik, beorientasi pada jasa, adanya tingkat kemandirian, baca selengkapnya *Pengantar Ilmu Perpustakaan...hlm. 147-157*.

sama kedalamannya? Sudah tentu tidak. Maka dalam bidang profesi dikenal konsep derajat minimum standar pengetahuan dan ketrampilan yang disyaratkan sebuah profesi dan pendidikan profesi. Hal itu terlihat pada kurikulum yang diberikan serta pengakuan dari organisasi profesi dalam hal ini adalah asosiasi di bidang biologi.

Jika sudah memenuhi persyaratan maka orang-orang yang memenuhi syarat diberi sertifikat yang merupakan pengakuan oleh sebuah badan pemerintah atau organisasi profesi atau gabungan kedua-duanya yang menyatakan bahwa seseorang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Sertifikat menyangkut penetapan satu bakuan kemampuan teknis. Biasanya sertifikat ini berjenjang, dalam beberapa profesi sertifikat ini ditinjau kembali secara berkala karena kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Profesional autodidak artinya orang yang tidak pernah memperoleh pendidikan formal dalam sebuah keahlian tetapi dengan cara belajar sendiri sehingga yang bersangkutan mampu menguasai ilmu setingkat atau mungkin lebih tinggi daripada mereka yang belajar secara formal.

Ilmu pengetahuan dan ketrampilan seorang profesional diperoleh dari lembaga pendidikan profesional khusus dalam bidangnya. Lembaga pendidikan ini merupakan bagian dari pendidikan tinggi dengan pengajar, kurikulum, media, sumber daya informasi, pengujian, lama belajar seyogyanya ditentukan oleh organisasi profesi.

Lembaga pendidikan bagi pustakawan hendaknya diakreditasi artinya disetujui oleh pemerintah dan organisasi profesi. Jika lembaga pendidikan ilmu perpustakaan belum diakreditasi maka lembaga pendidikan tersebut dianggap belum memenuhi profesi. Hanya sayangnya, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organisasi profesi mempunyai peran yang sangat terbatas dalam proses akreditasi program pendidikan perpustakaan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda jauh dengan American Library Association (ALA) yang sangat berperan penting dalam mengakreditasi pendidikan perpustakaan di Amerika Utara. Visi, misi, tujuan, dan sasaran program pendidikan perpustakaan yang jelas adalah beberapa hal yang tak bisa ditawar dalam pengembangan program.

Setiap ilmu dibagi atas dua bagian besar, yaitu bagian teoritis dan bagian praktis atau aplikasi. Bagian teoritis memberikan dasar-dasar teoritis sedangkan bagian aplikasinya mengajarkan bagaimana menerapkan ilmu itu. Acapkali perbedaan antara aspek teoritis dan aspek aplikatif sangat kecil. Dalam aspek teoritis diberikan bahasan teori, dalil, prinsip yang diterapkan dalam bentuk proses, kegiatan teknis untuk menyelesaikan masalah kepastakawanan yang dihadapi oleh para pustakawan maupun pemakai perpustakaan.

Ilmu perpustakaan tidak berdiri sendiri, melainkan bersentuhan dengan dengan bidang lain seperti psikologi, ekonomi, hukum, kedokteran, komunikasi dan lain sebagainya. Imbasnya, yaitu terjadinya spesialisasi dalam bidang kepastakawanan misalnya pustakawan sekolah, pustakawan nasional, pustakawan pribadi, pusat dokumentasi, depo arsip dan pusat analisis informasi.

Karena seorang profesional berorientasi pada jasa bagi pemakai lain, maka pustakawan di samping harus menguasai teori juga harus menguasai keahlian dan atau ketrampilan dalam menerapkan ilmunya. Untuk keperluan itu calon pustakawan harus magang (*internship*) baik di perpustakaan, maupun pusat-pusat informasi. Karena perkembangan ilmu pengetahuan sangat cepat, maka tenaga profesional yang sudah bekerja harus mengikuti perkembangan ilmunya agar ilmunya tidak ketinggalan zaman. Berbagai cara dapat dilakukan untuk pengembangan diri.

Dalam kaitannya dengan kemandirian, dikenal istilah yang erat hubungannya yaitu autoritas dan kemandirian. Mandiri berarti seorang profesional harus dapat mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan di pihak lain. Dia harus mempunyai integritas yang tinggi terhadap profesinya. Dalam praktek kemandirian, profesi pustakawan masih sulit ditegakkan. Bagi pustakawan yang merupakan pegawai negeri, dia selalu terikat pada birokrasi yang mungkin dalam mengambil keputusan bukan atas dasar pertimbangan profesional. Seorang profesional sejati biasanya tidak mempunyai atasan, tetapi berdiri sendiri. Dan hal ini untuk sekarang masih sulit dilakukan oleh pustakawan.

Sikap masyarakat juga terkadang tidak mendukung kemandirian seorang pustakawan. Masyarakatlah yang menentukan layanan perpustakaan, bukan

pustakawan. Misalnya, seorang pemakai menginginkan materi tentang Perang Paderi, maka pustakawan perlu menelusur dokumen tentang Perang Paderi. Terpulang kepada pemakai untuk membaca dokumen yang dicarikan itu atau tidak. Ini berbeda sedikit misalnya hubungan antara dokter dengan pasien. Ketika dokter menentukan jenis obat untuk pasien, maka pasien tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari obat sendiri. Kegiatan dokter seperti ini merupakan monopoli, dalam arti tidak bisa dilakukan oleh profesi lainnya. Berbeda dengan profesi pustakawan, cukup banyak kegiatan-kegiatan yang seharusnya hanya dilakukan oleh pustakawan tetapi ternyata dilakukan oleh orang lain. Sudah seharusnya kondisi ini harus diubah. Dan yang mengubahnya adalah pustakawan sendiri dengan meningkatkan profesionalitasnya di bidang kepustakawanan.

Istilah pustakawan dalam bahasa Inggris disebut dengan *librarian*. Di Indonesia terdapat bermacam-macam definisi tentang pustakawan. Ikatan Pustakawan Indonesia memberikan definisi pustakawan sebagai orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai dengan misi yang diemban oleh lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan. Definisi lain mengatakan bahwa pustakawan adalah orang yang mengelola sebuah perpustakaan beserta isinya, mengolah buku, dokumen dan materi nonbuku yang merupakan koleksi perpustakaan dan menyediakan informasi dan jasa peminjaman guna memenuhi kebutuhan penggunanya. Jika dijabarkan lebih lanjut, pustakawan adalah seseorang yang secara signifikan menguasai atau mengendalikan pengadaan, pengorganisasian, temu balik dan pendayagunaan informasi.

Karena perkembangan perpustakaan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan tuntutan kebutuhan penggunanya, maka pustakawan pun harus mengikuti perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut, agar selalu dapat menjembatani antara dunia informasi di satu sisi dengan dunia pengguna di sisi yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, mau atau tidak mau, seorang pustakawan harus selalu meng-*update* pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan tuntutan tadi.

Karena kemampuan, ketrampilan, dan pengetahuan pustakawan berbeda antara satu dengan lainnya, maka seyogyanya mereka tidak disamaratakan. Ada sebagian di antara pustakawan yang mempunyai wawasan yang luas, kemampuan teknologi informasi yang tinggi, tetapi ada juga sebagian pustakawan yang tidak tahu apa-apa. Kehidupan mereka hanya seputar menjaga buku semata. Oleh karena itu, ketika akan meningkatkan kemampuan mereka, perlu dicari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya, agar tepat sasaran.

Dalam abad informasi ini peranan profesi pustakawan juga berubah menjadi profesi informasi. Ini berarti pula program studi ilmu perpustakaan harus dapat mengakses dan menggunakan pengetahuan dan informasi yang beraneka ragam. Profesi informasi harus mampu melayani masyarakat informasi. Perubahan atau pengembangan profesi ini juga menuntut pustakawan untuk mengembangkan kapasitas dirinya, di antaranya melalui *continuing education*.

Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan *continuing education* bagi pustakawan, di antara adalah sebagai berikut :

- a. Pustakawan harus menjadi sumber yang dapat memperbaharui diri sendiri;
- b. Pustakawan hendaknya memperoleh kesempatan dan lingkungan yang layak untuk memperbaharui diri sendiri;
- c. Setiap pustakawan bertanggung jawab atas pembaharuannya sendiri;
- d. Setiap pustakawan juga bertanggung jawab atas pembaharuan rekan sejawatnya.

Strategi berikut ini akan membentuk profesi pustakawan, yaitu :

- a. Pustakawan harus diberitahu menjadi konsumen pendidikan berkelanjutan. Pustakawan harus belajar membedakan loka karya yang baik dan yang buruk. Pustakawan harus memberikan arus balik (*feedback*) khusus mengenai apa yang tidak dikerjakan, apa yang berguna dan apa yang akan lebih berguna.
- b. Usaha untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan ketrampilan dalam kepustakawanan melalui pendidikan yang berkelanjutan harus ditambah dan diperluas.

- c. Pergantian strategi pelatihan harus ditempatkan dalam konteks profesi. Unsur-unsur dari sistem partisipasi, pegawai organisasi, pelatih dan sponsor organisasi harus diasumsikan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pelatihan itu demi peningkatan.
- d. Pendidikan berkelanjutan dalam profesi harus dilaksanakan sepraktis mungkin.

Jika pustakawan tidak segera memperbaiki kemampuan dirinya melalui pendidikan berkelanjutan, maka besar kemungkinan kegiatan yang menjadi profesinya akan direbut oleh profesi lain. Apalagi kini hampir seluruh perpustakaan telah berubah dari sistem manual ke sistem terotomasi, misalnya dalam kegiatan akuisisi (*acquisition*), pengatalogan (*cataloging*), sirkulasi (*circulation*), dan bahkan temu kembali informasi (*information retrieval*). Dan bila dilihat secara cermat, sudah cukup banyak tugas profesi pustakawan tersebut diambil alih oleh pusat-pusat komputer dan ahli teknologi informasi.

Pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) dapat dilaksanakan secara formal, non formal maupun informal, baik melalui pendidikan, workshop, pelatihan, seminar, tutorial bahkan dapat dilakukan dengan belajar mandiri. Berbagai model pendidikan berkelanjutan harus dimulai dengan pemahaman tentang kebutuhan masing-masing pustakawan, dan tidak dapat disamakan.

Untuk itu *continuing education* harus diawali dengan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan dapat dilakukan oleh lembaga maupun individu yang mempunyai perhatian dan tanggung jawab dalam pengembangan pustakawan. Analisis kebutuhan dapat dimulai dengan menyebarkan kuesioner, wawancara atau evaluasi terhadap kinerja pustakawan.

Kuesioner, wawancara maupun evaluasi kinerja pustakawan tersebut dapat dilakukan langsung terhadap pustakawan, tetapi dapat juga melalui pendapat pimpinan di mana pustakawan bekerja, maupun melalui pendapat para pengguna perpustakaan yang dilayani oleh pustakawan tersebut.

Misalnya, jika pengumpulan data langsung melalui pustakawan, maka pustakawan dapat diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

- *What I have I achieved in my previous jobs?*

- *What do I well and/or enjoy in my present job?*
- *Where do I need to improve and/or develop my skill?*
- *Where and in what roles do I see my future?*
- *What new knowledge, skill and insights will I need?*
- *What development methods have helped me in the past?*
- *What development opportunities are available to me now?*
- *What constraints or problems might I encounter?*
- *What support might need/obtain from colleagues?*
- *What other resources will be available to me?*²⁰

Tentu saja agar mendapatkan data yang komplit dan akurat perlu dipertimbangkan secara cermat, pustakawan mana yang akan dijadikan sebagai responden maupun informan. Data-data yang diambil dari kuesioner ataupun wawancara tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah untuk mengetahui skala prioritas dari kebutuhan pustakawan dalam mengikuti *continuing education* nantinya. Kemudian dirancang materi-materi yang akan diberikan kepada pustakawan pada saat mereka mengikuti *continuing education*.

Di samping diambil melalui jajak pendapat atau secara induktif, kebutuhan-kebutuhan itu juga dapat dilandaskan pada teori atau secara deduktif. Misalnya, sebelum menentukan materi-materi yang akan diajarkan atau diberikan dalam *continuing education*, lembaga atau penyelenggara *continuing education* terlebih dahulu mempelajari teori-teori tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan, baik kompetensi sebagai pribadi maupun sebagai profesi.

Professional competencies berhubungan dengan pengetahuan pustakawan dalam area sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan untuk menggunakan area pengetahuan ini sebagai dasar dalam penyediaan layanan perpustakaan dan informasi. Sedangkan *personal competencies* merepresentasikan satu set ketrampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan pustakawan bekerja secara efisien, menjadi komunikator yang baik, selalu fokus pada pembelajaran lanjut sesuai karir yang mereka tempuh, dan

²⁰ Sheila Corral and Antony Brewerton. *The New Professional's handbook: Your guide to information services management...* hlm. 282.

mampu menunjukkan nilai tambah agar dapat memberikan kontribusi serta *survive* dalam dunia kerja yang baru dan terus berubah.²¹

Berikut ini adalah contoh kompetensi profesi pustakawan abad 21 :

- *Has expert knowledge of the content of information resources, including the ability to critically evaluate and filter them,*
- *Has specialized subject knowledge appropriate to the business of the organization or client;*
- *Develops and manages convenient, accessible and cost-effective information services that are aligned with the strategic directions of the organization;*
- *Provides instructions and support for library and information service users;*
- *Assesses information needs and designs and markets value-added information services and products to meet identified needs;*
- *Understands and uses appropriate information technology to acquire, organize, and disseminate information;*
- *Understands and uses appropriate business and management approaches to communicate the importance of information services to senior management*
- *Develops specialized information products for use inside or outside the organization or by individual clients;*
- *Evaluates the outcomes of information use and conducts research related to the solution of information management problems;*
- *Continually improves information services in response to changing needs;*
- *Is an effective member of the senior management team and a consultant to the organization on information issues.*²²

Kompetensi dasar pustakawan di atas dapat dipakai sebagai acuan untuk menyusun materi apa saja yang perlu diberikan kepada pustakawan yang mengikuti pendidikan lanjut. Akan lebih baik lagi jika kriteria-kriteria ini digabungkan dengan hasil kuesioner atau wawancara sehingga akan dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan yang tepat sasaran. Tentu saja ketepatan dalam menganalisis kebutuhan ini akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan *continuing education* dalam meningkatkan profesionalisme pustakawan.

²¹ *Ibid.* hlm. 268.

²² *Ibid.* hlm. 269.

Langkah berikutnya setelah menentukan materi adalah menentukan metode serta media yang akan digunakan dalam kegiatan *continuing education*. Ada sebuah pernyataan bahwa metode lebih penting dari materi (*al-ṭariqatu ahammu min al-maddah*), tetapi sebaliknya ada yang mengatakan materi lebih penting dari metode (*al-maddah ahammu min al-ṭariqah*). Menurut penulis, kedua-duanya sama pentingnya. Materi sebaik apapun jika tidak menggunakan metode yang tepat, boleh jadi tidak akan dipahami dengan baik. Sebaliknya metode yang sangat baik tetapi materinya keliru juga tidak akan berhasil baik pula. Jadi kedua-duanya, baik materi maupun metode adalah sama pentingnya untuk mendukung keberhasilan *continuing education*.

Di samping itu, tidak kalah pentingnya adalah motivasi pustakawan itu sendiri dalam mengikuti *continuing education*. Motivasi datangnya dapat dari dalam diri pustakawan maupun dari luar diri pustakawan. Kedua-duanya perlu digunakan agar pustakawan benar-benar mempunyai kemauan yang kuat dalam meningkatkan kualitas dirinya melalui *continuing education*.

Pustakawan perlu didorong dan dikenalkan peluang-peluang yang akan didapat jika mengikuti *continuing education*. Tidak kalah pentingnya adalah tentang kepuasan pengguna yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya akan terwujud jika pustakawan mempunyai keahlian sesuai dengan tuntutan atau harapan penggunanya.

F. PENUTUP

Dari uraian di atas, penulis menggarisbawahi bahwa pustakawan baik yang tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan maupun yang berlatarbelakang pendidikan perpustakaan perlu melaksanakan *continuing education*, agar ketrampilan, pengetahuan, sikap yang dimilikinya meningkat sesuai dengan perkembangan informasi, teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang dilayaninya.

Continuing education dapat dilakukan melalui kegiatan formal, non formal maupun informal, berupa pendidikan lanjut, workshop, seminar, pelatihan tutorial maupun dengan studi mandiri. Agar dapat berhasil baik, sebelum pelaksanaan *contintuing education*, perlu dilakukan analisis kebutuhan secara tepat baik dilaksanakan oleh individu maupun lembaga. Tujuannya adalah menghasilkan materi dan metode yang sesuai dengan kebutuhan pustakawan.

Dengan adanya pustakawan profesional yang selalu meningkatkan kualitasnya, maka otoritas dan kemandiriannya akan semakin baik, tugas-tugas kepustakawannya tidak akan diambil oleh profesi lain, serta dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap profesinya.

Peningkatan apresiasi terhadap profesi pustakawan ini merupakan upaya yang harus dilakukan terus menerus dan tiada henti. Dengan maksud, di antaranya adalah untuk meningkatkan derajat dan kedudukan pustakawan sebagai sebuah profesi yang mapan dan mandiri, bertanggung jawab, mempunyai otoritas yang tinggi. Jika hal ini terwujud, sangat mungkin akan terwujud pula kesejahteraan pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adomi, Esharenana E. and Nwalo Kenneth I.N. (2003) Prospect for Continuing Professional Education for Library and Information Science Professionals in Nigeria : The Case of Delta State. [Versi elektronik]. *New Library World*. 104,11/12, 499-508
- American Library Association. (1970) "Libraries education and manpower : ALA policy proposal" [versi elektronik]. *American Libraries 1* (April 1970). Hlm. 341-344.
- Bliss, Nonie Janet. (1993). "International Librarianship : a Bibliometric analysis of the field". *International Information dan Library Review*. Vol. 25, 1993, hl. 93-107
- Dahlstrom, Joe Frank. (1982). Motivation for Participation in Continuing Library Education. *A Dissertation* submitted to the Graduate College of Texas A&M University in Partial Fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy [versi elektronik]
- Dasgupta, Arjun and Satpathi, Jatindra Nath (2006) Continuing Education Programmes of LIS Professionals in The University of Bengal (India), [Versi Elektronik], *Proceeding of The Asia-Pacific Conference on Library and Information Education and Practice*, Singapore : School of Communication and Information, Nanyang Technology University., 230-246
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. (1988) *Kamus Inggris Indonesia = an English-Indonesia Dictionary*. Jakarta : Gramedia.
- Horvat, Aleksandra. (2004) Continuing Education of Librarians in Croatia : Problems and Prospect. [Versi Elektronik], *New Library World*.105,9/10, 370-375.
- Houle, Cyril O. (1980) *Continuing Learning in The Professions*. California : Jossey-Bass.
- Klevins, Chester (editor).(Tt.) *Materials and Method in Continuing Education*. Los Angeles : Klevins Publications.
- Knox, Alan B. (1974) Continuing education for library practitioners. [versi elektronik] *Illinois Libraries 56* 432-437
- Martin, Allie Beth. (1974) Continuing library what's happening? Who's responsible? [versi elektronik] *Illinois Libraries 56* hlm. 437-439.

- Missingham, Roxanne (2006). Library and Information science : Skills for Twenty-First Century Professionals, [versi Elektronik], *Library Management*, vol. 27 no 4/5-257-268
- Muis, A. (2001). *Indonesia di Era Dunia Maya : Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- Ramaiah, Chennupathi K. And Moorthy A. Lakshman. (2002). The Impact of Continuing Education Programmes on Library and Information Science Professionals[Versi Elektronik]. *Library Review*; 51, ½, 24-31
- Sheila Corrall and Antony Brewerton.(1999) *The New Professional's handbook : Your guide to information services management*. London : Library Association Publishing.
- Shera, Jesse Hauk. (1972). *The Foundation of Education for Librarianship*. New York : Becker and Heyes.
- Sulistyo-Basuki, (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia.